

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT**

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 Telp. (021) 3521974 Fax. (021) 3521985

NOTA DINAS

NOMOR : AK.03.02/25.1/SET.M.EKON.1/01/2026

Kepada Yth : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Dari : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Hal : Permohonan Penandatanganan Laporan Kinerja Triwulan IV 2025
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tanggal : 15 Januari 2026

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga agar dapat menyusun dan menetapkan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang telah dicapai, berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat kami laporkan sebagai berikut :

1. Permen PAN RB No. 88 Tahun 2021 mengamanatkan kepada setiap unit kerja untuk dapat menyusun Laporan Kinerja triwulanan dan pimpinan unit kerja dapat terlibat langsung pada penyusunan laporan tersebut dalam bentuk pengesahan dokumen laporan kinerja
2. Sehubungan dengan poin 1, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah mengkoordinasikan dan menyusun laporan kinerja triwulan IV 2025 sebagaimana terlampir di dalamnya terdapat informasi tentang capaian hasil pengukuran kinerja, pelaksanaan rencana aksi, capaian program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kendala serta upaya perbaikan pencapaian target
3. Apabila Bapak berkenan dan tidak berpendapat lain atas laporan kinerja triwulan IV yang telah disusun, kami mohon untuk dapat mengesahkan dokumen tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perkenaan dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih

Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja
dan Kerja Sama,



Evita Manthovani, S.E., M.Si.
NIP 197106061992012001

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
Sasaran Program 1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing					
1.1	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	84,01	84,01**	100%**
1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,76	6,76**	100%**
Sasaran Program 2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
2.1	Tingkat Input Maturitas Sirkular	Persentase	9,2%	9,2%**	100%**
2.2	Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	Nilai	Laki-laki 16.891; Perempuan 9.920	Laki-laki **16.891; Perempuan ** 9.920	100%**
Sasaran Program 3. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif					
3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	Persentase	100%	100%	100%
Sasaran Program 4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional					
4.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase	100%	100%	100%
Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas					
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	Indeks	3 dari 4	3.54	118%
Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik					
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	Persentase	100%	103%	103%

Keterangan :

* Masih bersifat prediksi serta target dipecah ke triwulanan dan menjadi dasar perhitungan capaian kinerja

** Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta *activity* yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan

Kinerja Sekretariat Kementerian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Program 1 : Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Reformasi Birokrasi General;
2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Reformasi Birokrasi General

Latar Belakang

Kemenko Perekonomian mengukur tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi melalui 2 indikator, yaitu : Nilai RB General dan Nilai RB Tematik. Reformasi Birokrasi (RB) General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan isu-isu struktural (hulu) yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, efektivitas atas proses bisnis, sistem kerja, dan peningkatan layanan publik. Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General ini berpedoman pada Permen PAN-RB No. 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Nilai RB General dihitung berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB terhadap capaian pelaksanaan pada indikator Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Setiap indikator memiliki bobot dan kriteria penilaian tertentu. Indikator RB General Kemenko Perekonomian terdiri dari 28 Indikator :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General
3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
4. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
5. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7. Nilai SAKIP
8. Indeks Perencanaan Pembangunan
9. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
10. Tingkat Digitalisasi Arsip
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
12. Indeks Pengelolaan Aset
13. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
14. Indeks Kualitas Kebijakan Publik
15. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
16. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor
17. Indeks Tata Kelola Pengadaan
18. Indeks Sistem Merit
19. Indeks Pelayanan Publik
20. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
21. Indeks SPBE
22. Capaian Prioritas Nasional
23. Capaian Indikator Kinerja Utama
24. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
25. Tindaklanjut Rekomendasi
26. Indeks BerAKHLAK
27. Survei Penilaian Integritas
28. Survey Kepuasan Masyarakat.

Tujuan dari IKU ini untuk dapat menggambarkan pelaksanaan atas RB General di lingkungan Kemenko Perekonomian dijalankan secara konsisten, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi alat ukur keberhasilan terhadap tata kelola organisasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV tahun 2025, Nilai Reformasi Birokrasi yang terealisasi sebesar 84,01. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga triwulan IV 2025, dengan ringkasan :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	84,01**	84,01**	100%**

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan. Realisasi Nilai RB General dikeluarkan oleh Kemenpan RB di akhir tahun.

Adapun proyeksi ketercapaian dari masing-masing Indikator Reformasi Birokrasi General pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator RB General	Bobot	Nilai Maksimal	Target 2025	Proyeksi Capaian 2025
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	3	2,55	2,55
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	100	7,00
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	100	2,00
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	5	2,00
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	5	3,58	2,86
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3	3	0,50	0,50
7	Nilai SAKIP	4	100	75	3,00
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	100	97	1,94
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	5	3	1,20
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	100	90	1,80
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	100	95	1,90
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	4	3,60	1,80
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	1,5	5	3	0,90
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	100	99	1,49
15	Indeks Reformasi Hukum	1,5	100	90	1,35
16	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	5	2,60	0,78
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	100	85	1,70
18	Indeks Sistem Merit	4	410	345,50	3,37
19	Indeks Pelayanan Publik	1,5	5	4,50	1,35
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	100	-	-
21	Indeks SPBE	9	5	4,20	7,56
22	Capaian Prioritas Nasional	3	100	100	3,00
23	Capaian IKU	7	100	100	5,50

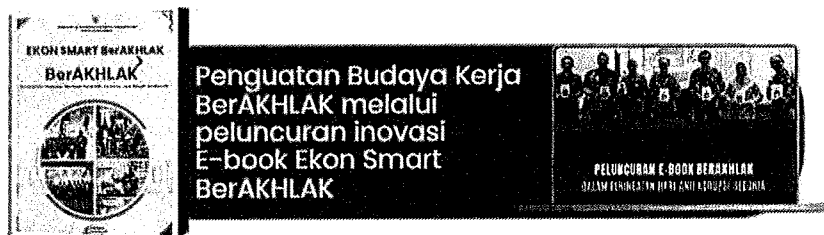
24	Opini BPK WTP	5	WTP	5	5,00
25	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	100	75	3,00
26	Indeks BerAkhlak	4	100	85	3,40
27	Survei Penilaian Integritas	10	100	82	8,20
28	Survei Kepuasan Masyarakat	8	100	95	7,60

Seluruh capaian di atas tidak terlepas dari Pelaksanaan Rencana Aksi RB General di tuang kedalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. 4/2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025. Rencana Aksi ini berisikan strategi yang dilakukan pada masing-masing indikator RB general agar target yang telah ditetapkan tercapai. Pada tahun 2025 telah melalui Persesmenko tersebut, ditetapkan sebanyak 66 rencana aksi dari 23 indikator kegiatan utama RB General, adapun pelaksanaan rencana aksi sampai dengan triwulan IV dapat di informasikan sebagai berikut :

No	Keterangan Renaksi	Jumlah Renaksi	Keterangan
1	Terlaksana	57 RA (86%)	Rencana aksi yang telah dilaksanakan, telah dilampiri dengan dokumen/bukti dukung
2	Tertunda atau digeser	4 RA (6%)	Penjelasan RA tertunda/digeser, sebagai berikut : - Penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 masih berlangsung dan draft Perjanjian Kinerja 2026 akan tersedia pada awal tahun 2026 (IKU : Nilai SAKIP) - Laporan kinerja Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV 2025 akan dilaporkan pada Januari 2026 (IKU : Indeks Tata Kelola Pengadaan) - Belum dilaksanakannya audit internal TIK oleh Inspektorat, (IKU : Indeks SPBE) - Monitoring capaian IKU dan strategi pemetaan perbaikan IKU akan dilaksanakan pada tahun 2026 (IKU : Capaian IKU)
3	Tidak Terlaksana	5 RA (8%)	Penjelasan RA tidak terlaksana, sebagai berikut : - Penyusunan peta RB Kemenko Perekonomian dilaksanakan dengan menunggu RoadMap RB Nasional yang rencananya disampaikan oleh KemenPAN-RB di TA 2026 (IKU : Rencana Aksi Pembangunan RB General) - Peraturan masih dalam bentuk draft dan belum ditetapkan. Kurangnya arahan dari Kementerian PAN-RB terkait penerbitan peraturan tersebut dan belum diadakan uji publik atas peraturan tersebut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (IKU : Tingkat Maturitas SPIP) - Sehubungan dengan belum ditetapkannya Roadmap SP4N-LAPORI Tahun 2025–2029 oleh Kementerian PAN-RB serta belum tersedianya pedoman penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi ini belum dapat dilaksanakan. (IKU : Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPORI)) - Capaian presentase pencatatan SIRUP per Desember 2025 untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan hanya mencapai sebesar 39.05%. Sedangkan, program dukungan manajemen hanya mencapai 82.42%. Tidak tercapainya indikator 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pagu pengadaan sebagai nilai pembagi dari pagu yang terumumkan, sehingga pencatatan SIRUP tidak akan mencapai nilai maksimal sesuai pagu pengadaan di awal tahun anggaran 2025. (IKU : Indeks Tata Kelola Pengadaan)
	TOTAL		66 RA (100%)

Realisasi capaian pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General tahun 2025 adalah 86%. Perhitungan persentase didapatkan berdasarkan nilai total kegiatan terlaksana dibagi dengan kegiatan yang direncanakan. Didukung juga oleh pemenuhan dokumen bukti dukung pelaksanaan rencana aksi triwulan I, II, III dan IV, serta telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan rencana aksi RB General melalui laporan hasil evaluasi internal *Ex-Ante* dan *On Going*.

Pada tahun 2025, seluruh Unit Kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian menunjukkan kinerja yang meningkat secara konsisten pada setiap triwulan. Seluruh indikator kegiatan utama pada Reformasi Birokrasi (RB) General berhasil menunjukkan hasil kinerja yang memuaskan. Hal lain yang dilakukan adalah memperkuat budaya kerja BerAKHLAK melalui peluncuran inovasi E-Book EKON SMART BerAKHLAK, serta mendorong partisipasi aktif unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.



Pencapaian atas kinerja tersebut menjadi pondasi penting sehingga mendorong keberhasilan pelaksanaan RB di tingkat institusi. Konsistensi pelaksanaan rencana aksi, penguatan tata Kelola, serta internalisasi nilai-nilai RB yang telah terbangun sepanjang tahun 2025 juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan RB secara menyeluruh khususnya pada RB General. Hal ini tercermin dari berbagai indikator strategis RB General yang menunjukkan hasil positif dan peningkatan signifikan pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Untuk Indeks Reformasi Hukum (IRH) telah berhasil melampaui target dan memperoleh predikat AA (Istimewa) dengan **nilai 98,10**, meningkat **+1,12 poin** dari tahun sebelumnya. Hasil tersebut menempatkan Kemenko Perekonomian berada di **peringkat 3 (tiga) besar** dari seluruh Kementerian dan Lembaga.



Indeks Reformasi Hukum berhasil memperoleh nilai 98,10 kategori (Istimewa) dengan kenaikan poin +1,12 dari tahun sebelumnya.

Berikut ini merupakan perkembangan nilai IRH dari tahun 2022 s.d 2025:

No	Indikator RB General	Ta. 2023	Ta. 2024	Ta. 2025
1	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	87,85	96,98	98,10

2. Indeks Pelayanan Publik

Pengukuran penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah Kemenko Perekonomian melalui Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan atau OPP PPID sebagai unit lokus evaluasi pada tahun 2025 mendapatkan **peringkat 41** dari seluruh Kementerian/Lembaga dengan **nilai 4,41 poin**, hasil tersebut **naik 5 peringkat dari tahun 2024**



Indeks Pelayanan Publik berhasil memperoleh nilai 4,41 poin dengan peringkat 41 atau naik 5 peringkat dari tahun sebelumnya.

Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pelayanan Publik dari tahun 2022 s.d 2025:

No	Indikator RB General	Ta. 2023	Ta. 2024	Ta. 2025
1	Indeks Pelayanan Publik	3,72	4,48	4,41

3. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survey Penilaian Integritas (SPI) menjadi salah satu penilaian pada Reformasi Birokrasi General sebagai indikator pemantauan kualitas integritas instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penilaian pada tahun 2025 Kemenko Perekonomian berhasil mendapatkan **peringkat 6** dari seluruh Kementerian dengan **nilai 81,77 poin** dengan **kategori terjaga**, **hasil ini lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 72,32 poin** dan berhasil **naik 3 peringkat** dari tahun 2024



Survey Penilaian Integritas berhasil memperoleh nilai 81,77 poin dengan kategori terjaga dan naik 3 peringkat dari tahun sebelumnya.

Berikut ini merupakan perkembangan nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) dari tahun 2022 s.d 2025:

No	Indikator RB General	Ta. 2023	Ta. 2024	Ta. 2025
1	Survey Penilaian Integritas	76,24	81,81	81,77

4. Indeks Kepuasan Kebijakan (IKK)

Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrument penilaian yang dikembangkan LAN (Lembaga Administrasi Negara) untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah melalui pendekatan berbasis bukti, focus pada dampak Pembangunan strategis mencakup perencanaan, implementasi, evaluasi, keberlanjutan, transparansi, dan partisipasi public. Kemenko Perekonomian Kembali meraih penghargaan LAN sebagai Predikat Unggul pada IKK Tahun 2025, menegaskan komitmen reformasi tata Kelola kebijakan yang adaptif dan berdampak, setelah sebelumnya meraih nilai sangat tinggi di tahun 2023.



Indeks Kualitas Kebijakan berhasil memperoleh predikat **Unggul** menegaskan komitmen reformasi tata kelola kebijakan yang adaptif dan berdampak.

Berikut ini merupakan perkembangan nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) dari tahun 2022 s.d 2025:

No	Indikator RB General	Ta. 2023	Ta. 2024	Ta. 2025
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Unggul	Unggul	Unggul

Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan terencana, terkontrol dan optimal hingga akhir tahun, didukung oleh system monitoring yang efektif. Meskipun terdapat dinamika kebijakan dan penyesuaian anggaran, capaian kinerja tetap terjaga melalui penguatan koordinasi dan sinergi.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Monitoring Evaluasi Implementasi Rencana Aksi triwulan III dan IV	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan rencana aksi RB triwulan III dan IV
2.	Pengumpulan Dokumen Pendukung Implementasi Implementasi RB General Triwulan IV	Terlaksana	Telah disampaikan bukti dukung rencana aksi RB General di triwulan IV
3.	Finalisasi Pengumpulan Seluruh Bukti Dukung untuk Penilaian	Terlaksana	Bukti dukung yang disampaikan sudah 100% dan merupakan dokumen final untuk penilaian
4.	Penyusunan Laporan Buku Profil Pelaporan Reformasi Birokrasi TA 2025	Terlaksana	Penyusunan laporan akhir pelaporan Reformasi Birokrasi TA 2025, telah dilaksanakan untuk kemudian dilanjutkan pada pengesahan

Pelaksanaan renaksi sepanjang Triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

- Melaksanakan koordinasi dalam satu kegiatan yang sama
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM anggota yang masuk ke dalam Pokja melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop* online
- Pengumpulan dan *sharing* data dukung kinerja melalui media berbagi pakai
- Monitoring online pada data dukung final yang disampaikan
- Memaksimalkan otomatisasi laporan rencana aksi yang dilaksanakan pada laporan rutin melalui link Ms. Exel

Pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan tingkat efektivitas yang optimal. Meskipun terdapat kebijakan *self bloking/automatic adjustment* anggaran namun seluruh kegiatan strategis dan target kinerja tetap dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan rencana. Adapun jumlah anggaran yang telah diefisiensi adalah sebesar Rp 67.000.000 dan telah dialihkan ke kegiatan lain yang strategis.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dan berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja secara keseluruhan antara lain :

1. Perubahan kebijakan Reformasi Birokrasi yang dinamis dari Kemenpan RB, hal ini menyebabkan banyaknya penyesuaian cepat yang harus dilaksanakan pada tingkat institusi pelaksana.
2. Perubahan aspek penilaian pada beberapa indikator RB General yang berdampak pada kebutuhan penyesuaian dokumen dan bukti dukung.
3. Translasi kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional ke level operasional di unit kerja yang belum sepenuhnya optimal.

Sebagai tindaklanjut atas berbagai dinamika dan tantangan tersebut, dan dalam rangka meningkatkan capaian yang lebih maksimal di tahun depan, maka :

1. Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik dengan instansi Pembina dan evaluator Meso maupun dengan unit kerja internal di lingkungan Kemenko Perekonomian. Penguatan koordinasi ini diarahkan untuk memastikan keselarasan pemahaman kebijakan, ketepatan pemenuhan indikator, serta konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga kualitas capaian kinerja dapat terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Penajaman rencana aksi tahun 2026 yang mengarah pada perumusan *framework* RB Kemenko Perekonomian dalam dokumen reformasi birokrasi internal yang berbasis koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, bukan fungsi layanan teknis.
3. Melakukan penetapan indikator Reformasi Birokrasi general yang menjadi fokus di tahun berjalan dan menggambarkan upaya pencapaian targetnya di rencana aksi 2026.
4. Melaksanakan Penguatan Penjenjangan Kinerja pada Unit Eselon II, sehingga kualitas penjenjangan kinerja Reformasi Birokrasi dapat berjalan optimal.

1.2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Latar Belakang

Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor – sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan RB pada periode transisi tahun 2025, Tema RB Tematik pada periode 2025 – 2029 meliputi :

1. RB Pengentasan Kemiskinan
Tema RB ini diarahkan pada perbaikan tata Kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan.
2. RB Peningkatan Investasi
Tema RB ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Upaya yang dilakukan mencakup penyederhanaan proses bisnis dan regulasi, percepatan proses perizinan, peningkatan koordinasi antar instansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan public untuk mendorong peningkatan realisasi investasi
3. RB Mendorong Hilirisasi
Tema RB ini diarahkan pada penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri.
4. RB Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan
Tema RB ini diarahkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan percepatan peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan baik primer maupun lanjutan. Sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang merata, aman, dan bermutu kepada setiap Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
5. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Tema RB ini diarahkan untuk mendukung prioritas aktual Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi tingkat kerawanan pangan di daerah. Birokrasi diarahkan untuk melaksanakan tata kelola dalam Upaya mewujudkan transformasi pengelolaan pertanian dari tradisional menjadi pertanian modern dengan mendorong peningkatan produksi pangan

6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan
Pada tema RB ini diarahkan untuk melaksanakan tata kelola dalam mewujudkan transformasi Pendidikan yang berkualitas dan bermutu

Tujuan dari indikator kinerja utama ini, untuk menggambarkan tingkat keterlibatan Kemenko Perekonomian dalam penyelesaian isu-isu strategis nasional yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU ini pada tahun 2025 bernilai 6,67 poin. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada tren realisasi tahun sebelumnya. Hingga Triwulan IV tahun 2025, nilai Reformasi Birokrasi Tematik telah memenuhi target, karena penilaian RB Tematik diambil dari hasil penilaian tahun sebelumnya. Berikut ini adalah capaian kinerja di triwulan IV :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU 1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,76	6,76	100%

Seluruh Unit kerja level Eselon I di lingkungan Kemenko Perekonomian memiliki tanggung jawab ketercapaian pelaksanaan rencana aksi RB Tematik yang disertai dengan data bukti dukung capaian kegiatan yang berhasil dilaksanakan diupload pada di SIMERSI RB TEMATIK, link <https://tinyurl.com/SIMERSIRBTEMATI2025> Pada masa transisi ini Tim Penilai Nasional dari Kemenpan RB menggunakan metode penilaian yaitu :

- a. **Nilai terbaru**, apabila K/L Meso melaksanakan evaluasi di Tahun 2025; atau
- b. **Nilai tahun sebelumnya**, apabila K/L Meso tidak melaksanakan evaluasi di Tahun 2025

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 disusun oleh Kementerian PANRB. Penetapan GDRBN 2025 – 2045 ini merupakan perpaduan dari RPJPN 2025-2045, capaian dari Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan isu strategis global dan nasional. GDRBN 2025-2045 merupakan dasar pelaksanaan penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2025–2029 di seluruh K/L dan Pemda.

Kemenko Perekonomian telah menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2025 berdasarkan *guidence Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2025–2029. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian Tahun 2025.

Pada tahun 2025, terjadi perubahan Tema pada komponen di RB Tematik. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut :

No	Tema Lama	No	Tema Baru
1	RB Peningkatan Investasi	1	RB Pengentasan Kemiskinan
2	RB Pengentasan Kemiskinan	2	RB Peningkatan Investasi
3	RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	3	RB Mendorong Hilirisasi
4	RB Pengendalian Inflasi	4	RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
5	RB Peningkatan Produk dalam Negeri	5	RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
		6	RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari pelaksanaan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 menuju *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045, serta dari *Roadmap* Reformasi Birokrasi tahun 2020–2024 menuju *Roadmap* Reformasi Birokrasi tahun 2025–2029, maka diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2025.

Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik 2025 di lingkungan Kemenko Perekonomian dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

- 4 (empat) tema RB Tematik yang baru, ***hanya dinilai dari kualitas Rencana Aksi (renaksi) yang telah disusun dan kualitas sasaran keberhasilan RB.***
Tema itu meliputi :
 - a. RB Mendorong Hilirisasi,
 - b. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional,
 - c. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, dan
 - d. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan.
- Sedangkan, 2 (dua) tema RB Tematik yang lama yaitu Tema RB Peningkatan Investasi dan Tema RB Pengentasan Kemiskinan ***menggunakan nilai pada tahun sebelumnya (TA. 2024).***

Hasil nilai Kedua akan digabung untuk mendapatkan hasil akhir nilai RB Tematik Tahun 2025. Tim Penilai Nasional (TPN) akan melakukan reviu terhadap Rencana Aksi dan Laporan Monev yang disusun oleh K/L dan Pemda pada Tema RB Tematik yang baru sebatas bertujuan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas Rencana Aksi di tahun berikutnya. Hasil reviu atas 4 (empat) tema RB Tematik Baru tidak mempengaruhi penilaian akhir indeks RB tahun 2025.

Indikator atau kriteria penilaian Rencana Aksi Tematik oleh Kemenpan RB pada 4 (empat) tema RB Tematik baru :

Kualitas Sasaran Keberhasilan RB		
1	Kesesuaian Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Sasaran telah berorientasi hasil atau outcome
2	Kesesuaian Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	• Indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat khusus dalam tematik, serta secara logis dapat mendukung tercapainya dampak tematik (K/L) • Indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional.

3	Perumusan indikator telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup	Indikator yang dirumuskan telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran RB Tematik.
Kualitas Rencana Aksi		
1	Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Rencana aksi yang disusun secara logis dapat mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi pemerintah (tergambar dalam logframe/pohon kinerja)
2	Kualitas strategi/upaya yang terdapat dalam Rencana Aksi	Rencana aksi telah memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
3	Rencana Aksi memuat kolaborasi nyata	Rencana aksi memuat bentuk kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan

Berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB, nilai RB Tematik Kemenko Perekonomian di tahun 2025 nilainya masih sama dengan nilai tahun sebelumnya. Sehingga ketercapaian target di tahun ini dapat disimpulkan telah tercapai. Hal ini disebabkan karena tahun 2025 ini merupakan masa transisi *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020–2024 menuju *Roadmap* Reformasi Birokrasi tahun 2025–2029, dimana Tema RB Tematik yang baru komponen - komponen penilaiannya masih dirumuskan oleh Kemenpan RB.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan (Dapat Bersikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Monitoring Evaluasi Implementasi Renaksi Triwulan III dan Triwulan IV	Terlaksana	Telah melaksanakan monitoring pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan oleh unit-unit kerja pengampu
2.	Pengumpulan Dokumen Pendukung Implementasi RB Tematik Triwulan III dan Triwulan IV	Terlaksana	Dokumen pendukung implementasi RB Tematik di triwulan III dan IV yang bersifat final dan koreksi bersama dengan inspektorat
3.	Finalisasi Pengumpulan Seluruh Bukti Dukung untuk penilaian	Terlaksana	Seluruh bukti dukung untuk penilaian RB Tematik telah terpenuhi

Pelaksanaan renaksi sepanjang Triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

- Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema dalam 1 kesempatan yang sama
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop* online
- Pengumpulan dan *sharing* data dukung kinerja melalui media berbagi pakai

Pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan tingkat efektivitas yang optimal. Meskipun terdapat kebijakan *self blocking/automatic adjustment* anggaran namun seluruh kegiatan strategis dan target kinerja tetap dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan rencana. Adapun jumlah anggaran yang telah diefisiensi adalah sebesar Rp 58.000.000 dan telah dialihkan ke kegiatan lain yang strategis.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yakni:

1. Penyelarasan kebijakan RB nasional dengan mandat koordinatif Kemenko Perekonomian belum optimal karena tidak ada diferensiasi yang jelas antara peran Kemenko dan kementerian teknis dalam desain RB
2. Terdapat beberapa tema dalam RB Tematik tahun 2026 yang masih belum terlihat keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kemenko Perekonomian.

Sebagai tindaklanjut atas berbagai dinamika dan tantangan tersebut, dan dalam rangka meningkatkan capaian yang lebih maksimal di tahun depan, maka :

1. Melakukan penajaman rencana aksi. Startegi pencapaian IKU RB Tematik 2026 dapat diarahkan pada (a) Pemetaan peran unit kerja sesuai dengan lokus dan tema Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2026, (b) Pemetaan Prgram dan Kegiatan yang mendukung yang memeiliki relevansi dengan tema RB tematik
2. Melakukan Penguatan Komitmen Unit Kerja Pengampu Lokus. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa RB tematik menjadi salah satu fokus kegiatan di unit teknis maka perlu dimasukkan menjadi satu renaksi pada IKU yang bersifat *Learning and Growth*.

2

Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Input Material Sirkular
2. Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

2.1 Tingkat Input

Material Sirkular

Latar Belakang

PP Ekosistem Ekonomi Sirkular dengan indikator **Tingkat Input Material Sirkular yang diampu oleh Kemenko Perekonomian** mendukung Prioritas Nasional 2 Sasaran 06 yaitu Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025-2029. Kementerian PPN/BAPPENAS telah menyusun Peta Jalan dan **Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES)** Indonesia 2025-2045 sebagai panduan implementasi PP ini. Dalam RAN-ES tersebut dijelaskan bahwa **Ekonomi Sirkular** merupakan model ekonomi yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki

daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Berdasarkan RPJMN 2025 - 2029, proyek prioritas yang menjadi kawalan Kementerian Perekonomian dalam menkoordinasikan kebijakan pada sektor Material Sirkular adalah :

1. Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitasi pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular
2. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Nikel
3. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Tembaga
4. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Bauksit
5. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Timah
6. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Kimia

Ruang Lingkup Kebijakan Penerapan ekonomi sirkular di Indonesia diarahkan pada **3 (tiga) kebijakan utama**, yaitu (a) pengurangan penggunaan sumber daya, (b) perpanjangan daya guna produk dan material, dan (c) peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi. Arah kebijakan ekonomi sirkular tersebut menjadi acuan dalam dalam perancangan strategi transisi serta menentukan aksi dan implementasi.

Indikator Tingkat Input Material Sirkular merupakan **indikator dari kebijakan utama (1) pengurangan penggunaan sumber daya**. Indikator tersebut mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam produksi barang atau jasa. Baseline indikator ini di tahun 2024 sebesar 9%, dengan target tahun 2025 sebesar 9,2% dan tahun 2029 mencapai 10%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU ini pada tahun 2025 bernilai 9,2%. Hingga Triwulan IV tahun 2025, nilai Tingkat Input Material Sirkular belum dapat ditentukan, penilaian dilaksanakan pada akhir tahun. Nilai ini merupakan hasil penilaian mandiri berdasarkan aktifitas yang telah dilakukan. Berikut tabel hasil penilaian di triwulan IV :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular	Persentase	9,2%**	9,2%**	100%

**Nilai masih bersifat prediksi berdasarkan pengukuran activity yang dilaksanakan tahunan*

Arah kebijakan ekonomi sirkular berfokus pada transisi dari model “ambil–buat–buang” (linear) menjadi “*pakai ulang–daur ulang–hemat sumber daya*” (sirkular). Dengan tujuan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan keberlanjutan.

Peran Kemenko Perekonomian dalam ekonomi sirkular dapat diimplementasikan melalui sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk deregulasi kemudahan untuk industri dalam melakukan daur ulang, mengkoordinasikan kebijakan yang dapat mengubah paradigma produsen dalam mendesain produk, mempertimbangkan seluruh siklus hidup suatu barang produksi (*Extended Producer Responsibility*), memastikan keberlanjutan kebijakan atau rencana kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi sirkular, menciptakan ekosistem sirkular melalui mekanisme insentif dan disinsentif, dan mendorong kerja sama dengan sektor publik dan swasta untuk dukungan pembiayaan maupun keahlian

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV 2025, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Evaluasi pelaksanaan roadmap penggunaan material sirkular tingkat nasional	Terlaksana	Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan roadmap penggunaan material sirkular tingkat nasional
2.	Penyusunan rencana perbaikan kebijakan di tahun berikutnya	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan perbaikan kebijakan di tahun selanjutnya, yaitu : - Pelaksanaan Diseminasi Ekonomi Sirkular Sektor Industri pada 1 Desember 2025 - Pelaksanaan Diseminasi Hasil Kajian Akademis <i>Extended Producer Responsibility (EPR)</i> oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 17 Desember 2025 - Pelaksanaan Pelaporan Hasil Benchmarking Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada 18 Desember 2025.

Upaya nyata strategi dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Kick-off Meeting Program Prioritas Pekerjaan Hijau pada 24 Oktober 2025.
2. Telah dilaksanakan FGS Pendalaman dan Validasi Petunjuk Teknis P3NK, HPT, Carbon Financing, Asset Recycling untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan pada 10-11 November 2025.
3. Telah dilaksanakan Policy Dialogue dan Pengumuman Call for Proposal dalam Rangka Percepatan Rantai Nilai Plastik Berkelanjutan di Indonesia pada 3 Desember 2025.
4. Telah dilaksanakan Rapat Pemantauan Pelaksanaan RKP 2025 Triwulan III Program Prioritas Lingkup Lingkungan Hidup pada 8 Desember 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam memahami hal-hal yang menjadi isu utama.
3. Melaksanakan dialog kinerja Bersama.

4. Penggunaan penyimpanan dokumen data capaian berbasis Cloud, seperti Google Drive dan One Drive.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Sebagai contoh anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.59.376.000,- dan telah digeser pada kegiatan lain yang strategis.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV 2025, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yakni masih terbatasnya ruang lingkup koordinasi pada tahap pemetaan urgensi dan kelembagaan dalam penerapan Ekonomi Sirkular.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Tingkat Input material Sirkular.
2. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka implementasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular di Indonesia.
3. Berkolaborasi dengan kementerian/lembaga dan para pelaku usaha yang terkait dengan implementasi ekonomi sirkular di Indonesia

2.2 Pengeluaran Latar Belakang

Perkapita

Laki-Laki

dan

Perempuan

Salah satu indikator RPJMN 2025–2029 adalah Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP), yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian. PPLP tercantum dalam Prioritas Nasional 4, Program Prioritas ke-19, dan menjadi indikator ke-6 yang mencerminkan capaian kesejahteraan berbasis gender. Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan merupakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan jenis kelamin kepala rumah tangga (L/P) yang dihitung berdasarkan paritas daya beli dengan mempertimbangkan perbedaan harga antar daerah dan pembobotan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki maupun perempuan.

Pada tahun 2023, capaian pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp 16.736 ribu, sedangkan perempuan mencapai Rp 9.579 ribu. Sementara pada tahun 2025 tingkat pengeluaran tersebut diharapkan dapat meningkat dengan target sebesar Rp 16.891 ribu (laki-laki) dan Rp 9.920 ribu (perempuan). Selanjutnya pada tahun 2029 ditargetkan mencapai Rp 17.899 ribu (laki-laki) dan Rp 10.603 ribu (perempuan). Peningkatan pengeluaran per kapita baik laki-laki maupun perempuan diharapkan meningkat dari tahun 2025 hingga 2029

Apabila merujuk ke definisi dari indikator ini maka faktor pembeda pengeluaran berdasarkan gender tersebut adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki maupun perempuan. Di mana secara historis TPAK laki-laki lebih besar dari perempuan. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki mencapai 84,66%, sementara perempuan hanya 56,42%. Maka peningkatan pengeluaran per kapita berdasarkan gender tentu akan mengalami peningkatan bila ekonomi (PDB) meningkat. Namun, untuk meningkatkan pengeluaran per kapita perempuan diperlukan upaya lebih karena TPAK-nya yang masih rendah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK perempuan yaitu:

1. Pendidikan, di mana jumlah perempuan yang berpendidikan tinggi lebih banyak namun tidak masuk dalam angkatan kerja;

2. Jenis pekerjaan, di mana perempuan cenderung berada di sektor informal atau paruh waktu;
3. Tingkat kesehatan yang mempengaruhi produktivitas dan pola konsumsi;
4. Akses terhadap teknologi digital yang memengaruhi peluang ekonomi dan pengeluaran;
5. Ekonomi perawatan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui *Care Economy Industry*. Sektor ini yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:
 - a. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
 - b. Perluasan lapangan kerja di sektor perawatan bagi perempuan dan laki-laki.

Arah Kebijakan dari IKU Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan yaitu:

- Jaminan kesetaraan partisipasi pendidikan antar gender guna memperluas peluang kerja bagi perempuan;
- Akses terhadap pembiayaan dan pelatihan usaha membatasi pilihan kerja mandiri, khususnya bagi kelompok rentan, berpendapatan rendah, dan di daerah terpencil
- Persentase perempuan berpendidikan tinggi yang secara sukarela berada di luar angkatan kerja masih tinggi;
- Beban ganda peran domestik dan terbatasnya dukungan terhadap pengaturan kerja yang ramah keluarga;
- Mendorong regulasi ketenagakerjaan yang adaptif dan ramah perempuan agar mereka tetap bertahan di angkatan kerja.
- Kebijakan ekonomi perawatan ini sangat menunjang upaya penghapusan kesenjangan gender dan mendobrak budaya patriarki melalui penguatan kapasitas perempuan, pembagian kerja perawatan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dan peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU pada tahun 2025 yaitu Laki-laki pengeluaran perkapitanya Rp.16.736 dan Perempuan pengeluaran perkapitanya Rp9.579. Hingga Triwulan IV 2025, nilai Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan belum dapat ditentukan, penilaian dilaksanakan pada akhir tahun. Nilai triwulan ini merupakan hasil penilaian mandiri berdasarkan aktifitas yang telah dilakukan. Berikut tabel hasil penilaiannya :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU 2.2 Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	Rupiah	Lk : 16.736 Pr : 9.579	Lk : 16.736** Pr : 9.579**	100%**

*Nilai masih bersifat prediksi berdasarkan pengukuran activity yang dilaksanakan secara mandiri pada triwulan IV

Hasil koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan beberapa kementerian/lembaga terkait seperti: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian UMKM, Kementerian

Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, OJK, Bank Indonesia mengidentifikasi sejumlah program unggulan, antara lain:

- Literasi Digital (Kemenkominfo): Program Digital Talent Academy dan Pandu Literasi Digital menjangkau ribuan peserta, termasuk perempuan, untuk meningkatkan keterampilan digital.
- Literasi Keuangan (OJK): Program "Gencarkan" menjangkau 187.140 perempuan melalui 1.535 kegiatan edukasi keuangan hingga Mei 2025.
- Pemberdayaan UMKM (Kemen UMKM): Program LAKSMI dan Entrepreneur Hub mendukung UMKM perempuan, meskipun belum sepenuhnya spesifik untuk perempuan.
- Care Economy (KPPPA): Program Rumah Bersama Indonesia dan peta jalan ekonomi perawatan memperkuat partisipasi perempuan.
- Pariwisata Halal (Kemenpar): Pelatihan pemandu wisata dan digital marketing melibatkan 35-45% peserta perempuan.
- Ekonomi Inklusif (Bank Indonesia): Program Strive Indonesia menargetkan 300.000 UMKM, dengan 190.000 tercapai hingga 2025, banyak melibatkan perempuan.

Hingga triwulan IV upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Telah dilaksanakan Benchmarking Program Pembangunan Responsif Gender di Daerah dalam implementasi penguatan partisipasi perempuan dalam perekonomian di beberapa wilayah antara lain:
 - Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya pada 25 September 2025
 - Provinsi Jawa Tengah pada 30 September 2025
 - Kota Semarang pada 1 Oktober 2025
 - Kota Surakarta pada 23 Oktober 2025
 - Kota Denpasar pada 29 Oktober 2025
 - Kabupaten Gianyar pada 30 Oktober 2025
 - Kota Sawahlunto pada 4 November 2025
2. Telah dilaksanakan Advokasi percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Kementerian/Lembaga Penggerak dan Pengampu 5 Sektor Pembangunan pada 4 November 2025.
3. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Kementerian/Lembaga Penggerak dan Pengampu di 5 Sektor Pembangunan pada 18-19 November 2025.
4. Telah dilaksanakan Rapat Internalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada 24 November 2025.
5. Telah dilaksanakan Rapat Uji Coba Modal PUG dengan KemenPPPA pada tanggal 3 Desember 2025
6. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk Persiapan Evaluasi PUG 2024 dan 2025 (PPE Tahun 2026) untuk Kementerian/Lembaga pada 16 Desember 2025
7. Telah dilaksanakan Uji Coba Kerentanan Aplikasi Evaluasi PUG dan Informasi User Password serta Jadwal Pelaksanaan Evaluasi PUG Tahun 2024-2025 pada 24 Desember 2025.
8. Menghadiri Advokasi Ekonomi Perawatan untuk Peningkatan TPAK Perempuan pada 24 Oktober 2025.
9. Menghadiri Diseminasi DNTG dan Inovasi Layanan Inklusi Keuangan Perempuan pada 31 Oktober 2025.
10. Menghadiri Peluncuran Buku Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 pada 19 November 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV 2025, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 2.2 Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Evaluasi penerapan kebijakan pengeluaran gender	Terlaksana	Telah dilaksanakan evaluasi penerapan kebijakan-kebijakan dalam implementasi PPLP di KL terkait dan daerah
2.	Penyusunan strategi penguatan kebijakan untuk tahun berikutnya	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Internalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada 24 November 2025 - Telah disusun laporan hasil benchmarking Program Pembangunan Responsif Gender di Daerah dalam implementasi penguatan partisipasi perempuan dalam perekonomian - Telah disusun konsep Pedoman Pengarusutamaan Gender Kemenko Perekonomian

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam memahami hal-hal yang menjadi isu utama
3. Melaksanakan dialog kinerja bersama
4. Penggunaan penyimpanan dokumen data capaian berbasis Cloud, seperti Google Drive dan One Drive.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang strategis pada triwulan IV sebesar Rp.43.327.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yakni tingginya kompleksitas faktor-faktor pembangun indikator Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan yang menyebabkan proses koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan harus lintas K/L dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yaitu memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan.

3

Sasaran Program 3 : Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efisien

Pencapaian Sasaran Program 3 : Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efisien ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan

3.1 Persentase Latar Belakang

Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan

Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dilaksanakan melalui forum koordinasi, fasilitasi, dan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Indikator Utama ini menekankan *outcome*, tingkat penerimaan dan pemanfaatan konkret dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan.

Adapun rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah :

1. Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
Kegiatan ini mencerminkan peran dari Kemenko Ekon dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terintegritas, dan berdampak. Melalui koordinasi ini diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak terjadi duplikasi kebijakan, stagnasi pelaksanaan, atau konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga
2. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja
Sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Kemenko Ekon berperan dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas sektoral yang mendukung penciptaan iklim usaha yang sehat, investasi yang kompetitif dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
3. Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan distribusi yang merata antardaerah, antarwilayah, serta kelompok masyarakat.

Rumus Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Ditindaklanjuti:

$$\% \text{ R. Kebijakan Lintas Sektor} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Terealisasi}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU pada tahun 2025 yaitu 100%. Hingga Triwulan III 2025, Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang dimanfaatkan terealisasi sebesar

75%. Nilai triwulan ini merupakan hasil penilaian mandiri berdasarkan aktifitas yang telah dilakukan. Berikut tabel hasil penilaian nya :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU 3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	Persen	100%	100%	100%

Kebijakan lintas sektor yang aktivitasnya telah dilaksanakan hingga Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Syariah

Potensi ekonomi syariah dapat dioptimalkan dengan ekosistem halal yang terintegrasi, baik dari sisi keuangan syariah, industry halal, dan keuangan sosial syariah. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025 – 2029 menargetkan penguatan rantai nilai halal dan platform digital. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas dan koordinasi antar sektor seperti BPJPH, Kementerian Perindustrian dan KNEKS. Terkait dengan digitalisasi, saat ini mulai berkembang platform sertifikasi halal online dan marketplace halal. Akan tetapi, masih memerlukan regulasi yang mendukung keamanan siber dan kepatuhan syariah. Kolaborasi lintas sektor dan kerja sama internasional, seperti dengan Islamic Development Bank (IsDB) diperlukan untuk membangun ekosistem halal yang kokoh.

Pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Ekonomi Syariah hingga triwulan IV tahun 2025, disampaikan sebagai berikut:

- Melaksanakan kolaborasi antara BPJPH dengan Kementerian Agama, dengan pemisahan umum di Kementerian Agama dan peraturan Khusus di BPJPH.
- Koordinasi pembahasan rancangan Per-BPJPH tentang Tata Niaga Impor Produk Halal sebagai dasar penyusunan Surat Kesesuaian Kehalalan (SKK) yang perlu ditindaklanjuti lebih detail kembali dalam ketentuan regulasi kehalalan produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Monitoring implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 sebagai tindak lanjut kejelasan wewenang tugas fungsi ekonomi syariah yang di-lead oleh KNEKS dan OJK untuk dikoordinasikan isu dan program kerja dengan kementerian/lembaga terkait.
- Melakukan pemetaan awal dalam deep analysis terkait dengan industri halal
- Menskinronisasi perumusan SKB MEKSI 2025-2029 yang akan digunakan sebagai dasar hukum kerja bersama kementerian/lembaga terkait implementasi masterplan ekonomi syariah di Indonesia.
- Mengkoordinasikan dokumen MEKSI 2025-2029 kepada KNEKS sebagai upaya penyempurnaan dokumen masterplan tersebut.
- Koordinasi acara Seminar *the Indonesian Association of Islamic Economists* (IAEI).
- Koordinasi Arah Kebijakan Penguatan Ekonomi Islam di Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dalam acara Sarasehan Ekonom Islam Indonesia

- Monitoring implementasi *launching State of the Global Islamic Economy* (SGIE) report 2024/2025 sebagai laporan tahunan yang mengukur perkembangan dan potensi ekonomi syariah global di berbagai sektor yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L terkait.
- Mengawal pembahasan payung hukum Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) melalui rencana penyusunan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
- Koordinasi Tindak Lanjut Pertemuan Pertama Dewan Koordinasi Tertinggi RI – Arab Saudi saat Kunjungan Presiden RI sebagai pemrakarsa yakni Kementerian Luar Negeri yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral melalui inisiatif strategis di berbagai bidang. Rapat ini membahas struktur organisasi DKT, tugas dan fungsi setiap level, inisiatif yang diusulkan, mekanisme kerja, serta tindakan lanjutan menuju pertemuan DKT berikutnya pada tahun 2027 di Indonesia.
- Koordinasi pembahasan Pleno Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025-2029.
- Memonitoring rapat koordinasi Isu Kehalalan Food Tray pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menyiapkan bahan paparan rangkuman Laporan SGIE report 2024/2025 untuk Bapak Sekretaris Kementerian sebagai update ekonomi Islam global terkini.
- Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Inisiatif Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada acara Bank Indonesia (BI).
- Menyusun bahan paparan summary laporan kinerja ekonomi dan keuangan syariah triwulan III tahun 2025 untuk Menko Perekonomian.
- Sosialisasi pada FGD Perkembangan Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal pada 16 Desember 2025.

2. Indonesia National Single Window (INSW)

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (INSW) dan untuk memperkuat kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang terintegrasi dalam Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Semester 1 Tahun 2025 oleh LNSW dan bekerja sama dengan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Rapat koordinasi tersebut merupakan Rapat Tingkat Eselon I dan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beberapa isu strategis tahun 2024 yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah antara lain: pembentukan Unit Layanan Single Window (ULSW), kode pelabuhan, Indonesia Single Risk Management (ISRM), Business Continuity Management System (BCMS), tata kelola pertukaran data, kanal komunikasi bersama, integrasi Single Submission Ekspor dengan e-SKA, posisi INSW pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan konsep RPerpres Logistik, mandatory sistem aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penambahan ruang lingkup Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA), identifikasi dual use items, integrasi SIMIRAH ke INATRADE dan SINSW dengan adopsi mekanisme SIMBARA, serta peningkatan keamanan sistem menanggulangi terjadinya *cyber-attack*.

Untuk tahun 2025, isu yang dapat diselesaikan pada semester I antara lain penguatan manajemen risiko melalui Indonesia *Single Risk Management* (ISRM), penyesuaian kebijakan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, layanan perizinan dalam satu aplikasi/*Single Submission*, serta rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW. Selanjutnya, lima usulan lima isu strategis untuk dapat dicapai pada 2026. Kegiatan strategis tersebut yaitu penyesuaian regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia *Single Risk Management* (ISRM) serta mekanisme pengawasan *Strategic Trade Management* (STM).

Hingga triwulan IV Tahun 2025, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan INSW, disampaikan sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan pembahasan Unit Layanan Single Window (ULSW) Kementerian Pertanian
- Telah dilaksanakan pembahasan capaian dan evaluasi isu strategis tahun 2024 dan usulan isu strategis tahun 2025. Selain itu, juga dilakukan pembahasan terkait dengan ketentuan pasal 19 Perpres No 44 Tahun 2018.
- Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Tingkat Eselon I yang dilaksanakan pada 2 Juli 2025
- Rapat Pembahasan Kode Simpul Transportasi Nasional dan Kode Pelabuhan Perikanan atas tindak lanjut penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kode Simpul Transportasi Nasional.
- Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Courtesy Visit dan Technical Workshop STM terkait dengan identifikasi HS code untuk barang-barang dual use item, konsep pola pengawasan dan perizinan, dan pembahasan terkait kesisteman pada 29 Juli 2025.
- Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Dewan Pengarah, telah dilaksanakan Rapat Teknis Unit Layanan Single Window (ULSW) pada 11 Agustus 2025.
- Telah dilaksanakan penyusunan rancangan Kepmenko tentang perubahan atau penambahan anggota LNSW karena adanya perubahan nomenklatur kementerian/lembaga yang terkait dengan ekspor, impor, dan logistik.

3. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Cipta Kerja disusun menggunakan metode omnibus law. Penggunaan metode omnibus menjadikan penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melibatkan koordinasi sejumlah Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan difasilitasi oleh Biro Hukum dan Organisasi yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja.

Hingga triwulan IV Tahun 2025, disampaikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Koordinasi penyusunan peraturan pelaksana undang-undang cipta kerja yang di prakarsai oleh Kemenko Perekonomian
- Pelaksanaan Koordinasi antar K/L dalam penyusunan revisi peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV 2025, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Efisien			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Memanfaatkan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian pada lintas sectoral dalam bentuk naskah kedinasan dan/atau karya tulis	Terlaksana	Telah memanfaatkan hasil koordinasi kebijakan dibiidang perekonomian

Hingga triwulan IV upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

- Menghadiri pembahasan Survei Studi Nasional UNESCAP-IsDB pada 23 Oktober 2025.
- Menyusun bahan paparan Brief Sheet Ekonomi Syariah untuk Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi pada 20 November 2025.
- Menyusun bahan paparan membangun ekosistem ekonomi islam menuju Indonesia pusat ekonomi islam dunia untuk Menko Perekonomian pada tanggal 24 November 2025.
- Menyusun bahan paparan summary laporan kinerja ekonomi dan keuangan syariah triwulan III tahun 2025 untuk Menko Perekonomian pada tanggal 4 Desember 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Dilakukan kolaborasi pembiayaan dengan stakeholder terkait.
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
3. Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.

Adapun hasil efisiensi yang dialokasikan untuk kegiatan lain yang strategis adalah sebesar Rp.75.263.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yakni:

1. Belum diimplementasikannya secara maksimal regulasi dari PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Terhambatnya proses koordinasi lintas KL dikarenakan adanya perubahan tugas dan fungsi unit kerja di setiap K/L .

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan

dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

1. Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait secara simultan untuk mempercepat proses pembahasan dan penyelesaian.
2. Koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga terkait dalam rangka advokasi Judicial Review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana.
3. Dukungan anggaran dalam rangka fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi antar kementerian/lembaga penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksana.
4. Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja di tiap K/L terkait.

4

Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional

Pencapaian Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Latar Belakang

Persentase penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintah merupakan ukuran yang menggambarkan capaian atas penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyelesaian Dokumen Tata kelola merupakan hasil dari proses bisnis sekretariat yang berfokus pada empat bidang utama yakni perencanaan, hukum dan organisasi, umum dan sumber daya manusia dan komunikasi, layanan informasi dan persidangan. Seluruh Dokumen Tata Kelola yang dihasilkan harus mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh instansi pembina. Adapun kriteria yang menunjukkan bahwa dokumen yang dihasilkan telah sesuai dengan standar apabila (1) Format dan Subtansi telah sesuai dengan acuan yang digunakan, (2) Dokumen dihasilkan tepat waktu, (3) Dokumen yang mendapatkan sedikit perbaikan dari instansi pembina.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV, Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target triwulan IV 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU 4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah	Persen	100%	100%	100%

Persentase penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan merupakan kegiatan di level outcome dari agregat kegiatan di level output pada internal business proses di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum

dan Sumber Daya Manusia, Biro Komunikasi Layanan dan Informasi dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV 2025, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja Triwulan IV	Terlaksana	Telah terlaksananya : (1) penyelesaian penyelarasan program, anggaran dan kinerja, (2) penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran, (3) penyelesaian penyelarasan kerjasama dan kinerja, (4) penyelesaian standar kebijakan, dan (5) penyelesaian penataan data dan sistem informasi
2.	Penyusunan, Penetapan dan Sirkulasi Dokumen Hukum dan Organisasi Triwulan IV	Terlaksana	Telah terlaksananya : (1) penyelesaian dokumen koordinasi perumusan produk hukum, (2) penyelesaian dokumen advokasi hukum, (3) penyelesaian instrumen penataan organisasi, (4) penyelesaian instrumen penataan sistem kerja, (5) penyelesaian dokumen RB tematik dan general
3.	Penyusunan, Penetapan, dan Sirkulasi Dokumen Administrasi Umum dan Manajemen SDM Triwulan IV	Terlaksana	Telah terlaksananya : (1) penyelesaian layanan SDM yang tepat waktu, (2) ketepatan waktu penyelesaian dokumen, (3) penyelesaian pengelolaan arsip secara elektronik, (4) penyampaian laporan pengelolaan asset yang tepat waktu, (5) pemanfaatan system informasi pengadaan, (6) pemenuhan SDM

			pengelola pengadaan barang dan jasa
4.	Penyusunan, Penetapan, dan Sirkulasi Dokumen Komunikasi dan Informasi Publik, Persidangan dan Naskah Menteri Triwulan IV	Terlaksana	Telah terlaksananya penyusunan, penetapan, dan sirkulasi dokumen komunikasi dan informasi publik

Hingga triwulan IV upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target adalah sebagai berikut:

1. Aspek Manajemen dan Kerja Sama :

- Melakukan Sinkronisasi Renja dan RKA K/L TW IV.
- Melakukan pemutakhiran atas penyusunan Renja 2025
- Finalisasi RKA-K/L dan Renja TA 2026
- Penyelenggaraan Rapat Harmonisasi dan Penetapan Rancangan Renstra K/L 2025-2029.
- Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2025 di lingkup Sekretariat untuk melihat hasil dan kualitas kinerja yang telah dihasilkan pada 2025
- Penyusunan laporan kinerja triwulan IV tahun 2025
- Penyusunan laporan kinerja tahun 2025
- Penyusunan dan permintaan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026
- Melakukan review atas dokumen Rencana Strategis yang telah di susun.
- Mengkoordinasikan penyusunan profil risiko dan petunjuk teknis MRPN LS Topik Pariwisata.
- Melakukan revisi DIPA dengan tujuan pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas pada Triwulan IV TA. 2025.
- Revisi Pemutakhiran POK TA 2025.
- Melakukan pembahasan rincian output baru dan rincian output yang mendukung PN pada tahun 2026.
- Melakukan sosialisasi atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029.
- Koordinasi dengan Mitra Kerja di Bappenas terkait RKP 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional
- Pelaksanaan Kickoff Meeting evaluasi AKIP Kementerian 2025
- Pemberitahuan unit kerja melalui ND permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I, II, III dan IV
- Melaksanakan reviu atas laporan kinerja yang telah disampaikan oleh unit – unit kerja, agar sesuai dengan pedoman teknis pelaporan kinerja
- Pelaksanaan koordinasi yang baik antara Sekretariat dengan unit-unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian
- Pelaksanaan penyusunan matriks tindaklanjut atas penyusunan indikator kinerja tahun 2025
- Meningkatkan ukuran ruang penyimpanan atas dokumen data dukung pelaksanaan kinerja yang terselesaikan
- Menyusun draft konsep kinerja dan mensosialisasikan kepada PIC unit kerja agar dapat meningkatkan pemahaman dalam menyusun kinerja
- Menyusun Nota Dinas permintaan penyusunan laporan kinerja TW IV

- Melaksanakan koordinasi eksternal dengan Kementerian/Lembaga terkait harmonisasi dan koordinasi isu-isu terkait
- Melaksanakan rapat pimpinan dalam mengevaluasi kinerja tahun 2025 dan menerapkan program penting arahan presiden langsung yang akan dibawa pada Kinerja 2026
- Melaksanakan sosialisasi dan permintaan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025
- Melaksanakan rapat bersama dengan seluruh unit kerja untuk penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026
- Telah dilakukan pengumpulan data melalui benchmarking dengan peraturan Standar Kebijakan pada Kementerian/Lembaga lain yang sudah terimplementasi dengan baik dan melakukan identifikasi keluaran kebijakan yang sudah diimplementasikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Telah dilakukan penyelarasan pedoman standar keluaran kebijakan dengan pokok-pokok untuk menunjang pencapaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Indeks Kualitas Kebijakan
- Telah dilakukan penyelarasan keterkaitan Pedoman SKK dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar penyusunan.
- Telah dilakukan pembahasan draft/rancangan standar keluaran kebijakan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Penyusunan draft standar keluaran kebijakan dan Notula Rapat
- Telah dilakukan konsultasi internal dan eksternal untuk memperkaya substansi pedoman, menerapkan nilai partisipatif pemangku kepentingan dan akuntabilitas proses.

2. Aspek Umum dan Sumber Daya Manusia.

- Pemberian konsultasi baik secara formal maupun informal melalui *direct* ataupun media telekomunikasi
- Penyelesaian masalah terkait layanan SDM dengan cara mengedepankan ketentuan hukum dan prinsip keadilan
- Rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan akuntansi keuangan
- Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAKPB
- Rekonsiliasi dengan KPPN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
- Pelaksanaan kegiatan pemberkasan arsip pada aplikasi SRIKANDI dilakukan rutin selama 1 tahun pada seluruh unit pengolah di lingkungan Kemenko Perekonomian
- Monitoring dan evaluasi implementasi SRIKANDI dilakukan dengan memberikan edaran kepada seluruh pegawai agar aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam kegiatan persuratan
- Pendampingan dan coaching klinik pencatatan non e-tendering, non e-purchasing, dan SIRUP
- Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM pengelola PBJ dengan kegiatan pengangkatan CPNS JF PBJ Ahli Pertama dijadwalkan pada triwulan II TA 2026

3. Aspek Hukum dan Organisasi:

- Penyelesaian permohonan penyusunan rancangan perundang-undangan sebanyak 290 permohonan yang terdiri dari 131 Peraturan perundang – undangan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan 159 Peraturan Perundang-undangan tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Melaksanakan bantuan hukum atau advokasi hukum sebanyak 12 permohonan

- Penetapan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam bentuk Sesmenko No. 33/2025
 - Analisis evaluasi struktur organisasi yang baru
 - Evaluasi kebutuhan pegawai dan jabatan
 - Penyusunan konsep standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi dan administrasi
 - Melaksanakan sejumlah diskusi terkait kebijakan tenaga pendukung tahun 2026
 - Memberikan revidi atas usulan dari unit kerja terkait uraian tugas jasa lainnya
 - Melakukan pendampingan penyesuaian formasi/kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
 - Melakukan pengembangan dan pembahasan bersama dengan perwakilan dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian terkait konsep SOP Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di lingkungan Deputi atas inisiatif unit kerja serta atas permintaan Sekretariat Kementerian/Inspektorat.
 - Melakukan asistensi pengembangan dan penyusunan konsep SOP yang dibutuhkan dalam membentuk Standar Pelayanan di lingkungan Kemenko Perekonomian;
 - Melakukan asistensi penyusunan, pembahasan dan finalisasi konsep SOP Layanan Kesehatan;
 - Melakukan pengembangan peta proses bisnis melalui SIA SPBE
 - Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB General dan Tematik, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tersebut dari triwulan I sampai dengan IV
4. Aspek Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan:
- Melaksanakan fasilitasi penyusunan naskah Menteri sesuai dengan permintaan kegiatan yang hingga TW IV ini telah difasilitasi 191 dokumen dalam 3 paket dokumen. Seluruhnya selesai paling lambat 1 jam sebelum pelaksanaan
 - Menyediakan naskah kepada Menteri Kemenko Perekonomian yang di sampaikan tepat waktu minimal 1 jam sebelum kegiatan berlangsung
 - Monitoring pemberitaan media massa dan percakapan media sosial sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun dokumen strategi komunikasi
 - Penyusunan dokumen strategi komunikasi Kemenko Perekonomian
 - Melalui mekanisme PPID telah dilaksanakan : (1) Pemenuhan permohonan informasi publikasi; (2) Penyediaan layanan pengajuan keberatan atas informasi publik; dan (3) Penyediaan layanan pengajuan sengketa atas informasi publik

Pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

- Melaksanakan rapat koordinasi beberapa unit kerja dalam 1 kesempatan yang sama
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop*
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive)

Adapun hasil efisiensi yang telah dialokasikan untuk kegiatan lain yang strategis pada triwulan IV sebesar Rp.48.987.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yakni :

- Dengan adanya kebijakan efisiensi 2025 yang berlanjut di 2026 menyebabkan tertundanya penetapan DIPA 2026 di awal bulan Desember
- Kebijakan RO khusus direktif presiden yang perlu ditambahkan pada Renja dan DIPA 2026 pasca penetapan DIPA awal 2026.
- Surat Menteri Keuangan nomor S-666/MK.03/2025 tanggal 21 Oktober 2025, mempercepat batas waktu revisi kewenangan Kementerian Keuangan dan Pemutakhiran POK 2025 yang semula di tanggal 23 menjadi 12 Desember 2025
- Koordinasi lintas unit membutuhkan waktu lebih lama dari rencana
- Masih minimnya SDM PBJ sehubungan dengan beban kerja unit kerja

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode mendatang yaitu :

- Melakukan percepatan penyesuaian perencanaan dan penganggaran melalui penajaman prioritas kegiatan agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif setelah DIPA ditetapkan
- Melakukan penajaman prioritas program dan kegiatan agar fokus pada pencapaian sasaran strategis dan kinerja utama
- Melakukan sinkronisasi dan penyesuaian cepat dokumen perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme revisi yang terkoordinasi.
- Menetapkan timeline internal yang lebih ketat dan melakukan percepatan koordinasi lintas unit kerja.
- Dialog kinerja dilaksanakan secara rutin.
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas transaksi belanja pemerintahan.
- Melaksanakan pelatihan/pembekalan dalam bentuk peningkatan kompetensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan.

5

Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Layanan Prima yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Layanan Prima yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

5.1 Indeks

Kepuasan

Layanan

Sekretariat

Latar Belakang

Salah satu Indikator Kinerja Utama Sekretariat adalah Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat yang diukur melalui Survei Kepuasan Layanan Sekretariat dengan responden para pejabat atau pegawai pada unit kerja lainnya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Layanan Sekretariat adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian kepada Kedeputian terkait pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sekretariat Kemenko Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :

- Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perekonomian

- Pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi ketatausahaan, SDM, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas, arsip
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- Pengelolaan data dan informasi
- Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretariat mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Kemenko Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

- **Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);**
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
- **Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);**
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
- **Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);**
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
- **Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);**
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
- **Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)**
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- Sangat Tidak Puas
- Tidak Puas
- Puas
- Sangat Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV tahun 2025, realisasi capaian hasil survey Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat adalah 3.56 atau Sangat Memuaskan, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3.56	118,66%

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian pada Tahun 2025 adalah 3.56 atau Sangat Memuaskan. Realisasi Kinerja Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan sebesar 3 dari 4 atau kategori PUAS. Capaian kinerja di tahun 2025 yaitu 118,66% melebihi ekspektasi yang diharapkan.

Pelaksanaan survey layanan Sekretariat dilakukan secara online melalui tautan <https://bit.ly/LayananSekre2025> yang disebarakan kepada unit kerja ke deputian. Pengukuran survei bertujuan untuk mengukur realisasi layanan Sekretariat yang diukur melalui 5 (lima) aspek, yaitu *Responsiveness, Emphaty, Reability, Tangible*, dan *Assurance*. Indeks kepuasan layanan Sekretariat diperoleh dari total seluruh nilai layanan yang meliputi : (1) Layanan Manajemen Kinerja dan Kerjasama, (2) Layanan Hukum dan Organisasi, (3) Layanan Komunikasi, Layanan informasi dan persidangan, dan (4) Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia.

Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian Semester I Tahun 2025 adalah 3.53 atau Sangat Puas. Pada semester II, indeks kepuasan layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian adalah 3.56 atau Sangat Puas. Nilai layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian tahun 2025 merupakan agregat dari nilai di Semester I dan II, sehingga nilai layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian tahun 2025 adalah 3,54 atau Sangat PUAS

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV 2025, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop Penguatan Kapasitas SDM	Terlaksana	Telah melaksanakan penyelenggaraan sosialisasi/workshop penguatan kapasitas SDM
2.	Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan pada triwulan IV	Terlaksana	Telah melaksanakan peningkatan layanan sarana dan prasarana layanan di triwulan IV
3.	Rekapitulasi Terkait Permohonan Layanan dari Unit Kerja Kedeputian pada triwulan III	Terlaksana	Telah melaksanakan Rekapitulasi pada masing-masing kebiroan terkait Layanan manajemen kerja sama, layanan hukum dan organisasi, layanan umum dan sumber daya manusia, dan layanan komunikasi, informasi dan persidangan
4.	Tindaklanjuti Keluhan Layanan dari Unit Kerja Pada Triwulan III	Terlaksana	Saran dan masukan pada laporan hasil survey kepuasan layanan Sekretariat di triwulan III pada Layanan manajemen kerja sama, layanan hukum dan organisasi, layanan umum

			dan sumber daya manusia, dan layanan komunikasi, informasi dan persidangan menjadi dasar perbaikan pada triwulan berikutnya
5	Penyusunan laporan kepuasan layanan Sekretariat dan Analisis Trend kepuasan dari tahun ke tahun	Terlaksana	Telah disusun laporan akhir kepuasan layanan sekretariat tahun 2025
6	Penyusunan rekomendasi perbaikan layanan	Terlaksana	Hasil dari laporan akhir kepuasan layanan Sekretariat menjadi dasar atau landasan dari penyusunan rekomendasi perbaikan layanan

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Layanan pembuatan akun SAKTI, SIMASPATEN, Digit
- Penyelesaian verifikasi tagihan pertanggungjawaban anggaran melalui aplikasi SIVERA sebanyak 875 SPM
- Terlaksananya urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan yang baik di lingkungan Kemenko Perekonomian yang dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan tata usaha pimpinan
- Layanan publikasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui Instagram dan website RB
- Layanan pendampingan terkait pelaksanaan indeks RB kepada unit kerja
- Layanan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang instrument penataan organisasi seperti penyesuaian jabatan fungsional di bidang keuangan negara dan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Kesehatan
- Layanan diskusi interaktif terkait pelaksanaan mekanisme kerja dengan unit kerja
- Layanan *Coaching Clinic* dan asistensi insentif dengan unit kedeputian terkait Manajemen Kinerja
- Penyediaan Software Global Trade Analysis Project (GTAP);
- Penyediaan data ekspor impor
- Melakukan pembangunan dashboard paket ekonomi;
- Melakukan penambahan fitur pada aplikasi SIVERA;
- Melakukan penarikan LAN *backbone* jaringan antar lantai;
- Melakukan update/patching *firmware UniFi controller*

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa :

- Penghematan anggaran melalui optimalisasi ruang rapat sebagai sarana pendukung
- Penggunaan aplikasi via zoom untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam forum rapat sehingga memberikan ruang kepada seluruh peserta rapat untuk dapat mengikuti acara yang telah direncanakan.
- Penggunaan aplikasi penyimpanan berbasis Cloud, seperti Gdrive
- Penggunaan aplikasi dalam pelaporan dan pengukuran laporan kinerja
- Penggunaan aplikasi dalam menyampaikan kendala/laporan
- Koordinasi antar layanan untuk meningkatkan pemahaman dan keselarasan dalam menyelesaikan laporan.

Adapun hasil efisiensi yang telah dialokasikan untuk kegiatan lain yang strategis triwulan IV sebesar Rp.25.394.000,-.

Kendala dan Upaya Perbaiki Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu masih kurangnya partisipasi para kedeputusan menjadi responden dalam pengisian survey.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan yaitu memperpanjang waktu pengisian survey dan mensirkulasikan informasi terkait pengisian survey ke unit kerja secara menyeluruh.

6

Sasaran Program 6 : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Pencapaian Sasaran Program 6 : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian

6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan persentase keterlaksanaan rencana aksi yang sudah ditetapkan dan tercermin pada pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat. Adapun penilaian indikator ini merupakan agregat dari nilai persentase pelaksanaan RB di level Eselon (Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Organisasi, dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan Unit Inspektorat).

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV 2025, nilai persentase pelaksanaan RB Sekretariat Kemenko Perekonomian yang telah terealisasi sebesar 85% atau mencapai 100% dari target triwulan IV tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%Kinerja
IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	%	85%	103%	120%

***nilai bersifat penilaian mandiri, penilaian akhir dihasilkan diakhir tahun*

Pada triwulan IV tahun 2025 indikator Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tertuang di dalam rencana aksi Eselon I Sekretariat meliputi :

1. Nilai SAKIP Sekretariat Kemenko Perekonomian

Berdasarkan Nota Dinas No. PW.04.01/195/INS.M.EKON/11/2025 tentang penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Es. I Sekretariat Kemenko Perekonomian tahun 2025, diperoleh nilai total sebesar 78,95 atau Kategori BB (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut

Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
		2024	2025
1. Perencanaan Kinerja	30%	26,23	26,61
2. Pengukuran Kinerja	30%	23,16	22,40
3. Pelaporan Kinerja	20%	16,78	15,01
4. Evaluasi Internal	20%	14,84	14,93
Total Nilai	100%	81,01	78,95

Berdasarkan tabulasi perbandingan dengan tahun sebelumnya, dapat dianalisis bahwa pada komponen Perencanaan kinerja dan komponen Evaluasi Internal telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena ada penguatan kegiatan :

- Penyusunan matriks IKU Sekretariat yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
- Memperbaiki konsep Perjanjian Kinerja sesuai dengan rekomendasi dari Evaluator.
- Menetapkan Permenko Nomor 19 tahun 2022 tentang aturan Teknis Perencanaan Kinerja yang menjadi arah kiblat penyusunan perencanaan
- Menyusun Matriks Peran Hasil yang menggambarkan kesinambungan serta keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai pada tiap level jabatan
- Penetapan Surat Keputusan Tim Kerja dan Pohon Kinerja Sekretariat Kemenko Perekonomian yang menggambarkan aktivitas antar bidang atau antar tugas atau fungsi lain yang bersangkutan
- Aktifnya pimpinan dalam perencanaan kinerja melalui dialog kinerja
- Menetapkan Permenko No. 8/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi AKIP dan penetapan SOP No.SOP-01/SES.M.EKON.1/01/2025 tentang SOP evaluasi internal AKIP pada unit kerja Sekretariat
- Penguatan SDM terkait evaluasi kinerja

Berdasarkan tabulasi perbandingan dengan tahun sebelumnya, dapat dianalisis bahwa pada nilai akhir komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan

Kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat diantisipasi ditahun berikutnya dengan cara melaksanakan penguatan aktivitas :

- Menyusun dan menetapkan kebijakan/peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengumpulan data kinerja
- Mempertajam definisi pengukuran pada manual IKU di setiap IKU
- Melengkapi data dukung pada setiap IKU Ke biroan Sekretariat
- mengimplementasikan SOP Reward and Punishment
- Hasil pengukuran kinerja dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyesuaian anggaran
- Melakukan revaluasi laporan kinerja pada level Es. I
- Memastikan di setiap IKU memiliki penjelasan upaya nyata dan/atau hambatannya dalam laporan kinerja tahunan
- Memastikan setiap unit kerja ke biroan memahami dan peduli atas laporan kinerja tahunan

Sekretariat pada pelaksanaan evaluasi AKIP Internal menduduki nilai peringkat ke 3 dari 6 unit eselon I lainnya. Seluruh unit kerja di LHE 2025 ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya masa transisi RPJMN yang baru.

2. Tingkat Digitalisasi Arsip

Pelaksanaan digitalisasi arsip di lingkungan unit kerja Kemenko Ekon telah menunjukan bahwa pengelolaan arsiparis telah bertransformasi dari sistem manual menuju sistem elektronik yang lebih efisien, akuntabel, dan mudah diakses. Dalam mendukung optimalisasi penggunaan digitalisasi maka yang telah dilakukan adalah :

- Seluruh kebijakan kearsipan ditetapkan dan disosialisasikan
- Menggunakan SRIKANDI di seluruh unit kerja dan menjalankan proses bisnis secara menyeluruh meliputi penciptaan arsip, pemberkasan termasuk penerapan tanda tangan elektronik yang bersertifikat BSSN
- Melaksanakan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) melalui diklat/pelatihan/coaching clinic sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mendukung dalam pengelolaan arsip
- Srikandi telah digunakan secara berkala didalam pemberkasan dan persuratan di Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihitung berdasarkan agregat capaian pelaksanaan rencana aksi RB di level eselon II pada triwulan IV adalah 103%, capaian ini di dorong oleh realisasi kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan RB Tingkat sekretariat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV 2025, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Fasilitasi Pembangunan ZI di unit kerja	Terlaksana	• Pemantauan pelaksanaan pembangunan ZI unit kerja telah dilaksanakan dan tertuang di dalam Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PW.04.05/45/INS.M.EKON. 2/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 • Rapat pembahasan terkait penilaian Lembar Kerja Evaluasi pembangunan ZI unit kerja oleh Tim Penilai Internal telah dilaksanakan pada tanggal 19 dan 23 Desember 2025
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV	Terlaksana	Telah melaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan IV
3.	Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	Telah menyusun draft perjanjian kinerja tahun 2026 Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Kemenko Perekonomian
4	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI Triwulan IV	Terlaksana	Telah memaksimalkan pemanfaatan SRIKANDI triwulan IV

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV 2025, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu:

- Perlunya peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan rencana aksi.
- Perlunya adaptasi kebijakan PKO yang baru ditetapkan oleh Kemenpan RB

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu

- Menyelenggarakan forum berkala untuk memonitoring pelaksanaan Reformasi di seluruh Eselon II di Sekretariat.
- Memperkuat asistensi unit kearsipan kepada seluruh Eselon II di Sekretariat

Jakarta, Desember 2025
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Susiwijono